

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh

Khairul Amri Nasution
NIM 52153040

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Disusun Oleh:

Khairul Amri Nasution

NIM 52153040

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairul Amri Nasution
Nim : 52153040
Tempat/tgl. Lahir : Ujung Padang, 22 September 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ujung Padang, Aek Natas, Kab. Labuhanbatu Utara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



Khairul Amri Nasution

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

Khairul Amri Nasution

Nim. 52153040

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S, Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 26 Desember 2019

Pembimbing I



Dr. Sugianto, MA

NIP. 19670607 200003 1 003

Pembimbing II

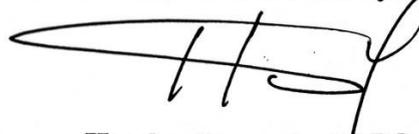


Mhd. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I

NIP. 198990426201903 1 007

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, M.Pd

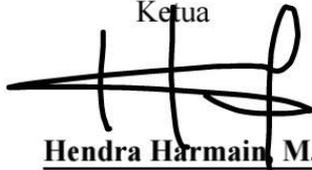
NIP. 197305101998031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**". Khairul Amri Nasution, NIM 52153040 program studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 17 Juni 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S, Akun) pada program studi Akuntansi Syariah.

Medan, 17 Juni 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



Hendra Harmain, M.Pd
NIDN. 2010057302

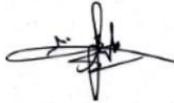
Sekretaris



Kusmilawaty, M. Ak
NIDN. 2014068001

Anggota

Pembimbing I



Dr. Sugianto, MA
NIDN. 2007066701

Pembimbing II



Muhammad Lathief Ilhamy, M. E. I
NIDN. 2026048901

Penguji I



Dr. Muhammad Ridwan, M.A
NIDN. 2020087604

Penguji II



Nurbaiti, M. Kom
NIDN. 0108087908

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602

Khairul Amri Nasution, Nim: 52153040 “*Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara*” Dibawah bimbingan pembimbing I Dr. Sugianto, MA dan pembimbing II Mhd. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Sumber pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara maupun pengisian koesioner sebanyak 36 orang. Pengolahan data ini menggunakan bantuan SPSS 23 *for windows*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dimana penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian R Square (R^2) sebesar 0,308 atau 30,8%. Besarnya nilai koefisiensi determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan mampu menjelaskan variabel terikat, yaitu kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 30,8% sedangkan sisanya sebesar 69,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dengan signifikansi 0.017 dan t hitung sebesar 2.514, untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dengan signifikansi 0.017 dan t hitung sebesar 2.881, dari hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaan $Y = 4,564 + 0,478 X1 + 0,411 X2 + e$

Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Berkat usaha yang maksimal dan dibarengi doa serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, untuk itu dalam pengantar skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terimakasih penulis sampaikan hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Alm. Dani Nasution dan Ibundaku tercinta Helmi Siagian yang sudah mendidik saya hingga saya bisa seperti ini dan juga seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, nasehat dan dorongan semangat, baik berupa moril maupun materil untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sehingga dapat memperoleh gelar sarjana S, Akun (Sarjana Akuntansi), penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Hendra Harmain, M.Pd, selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah dan sebagai penasehat akademik saya yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat.

4. Ibu Kusmilawaty, M. Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang banyak memberikan pelayanan dan membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta seluruh civitas akademik atas bimbingan, bantuan, dan layanan yang diberikan.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi Syariah B angkatan 2015.
8. Teman-teman KKN UINSU angkatan 2018 dikelompok 05 kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara, kota Binjai.
9. Para pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah berkenan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan sebaik mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga isi Skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, 20 Juli 2020

Penulis



Khairul Amri Nasution
NIM. 52153040

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kajian Teori	10
1. Kualitas Laporan Keuangan.....	10
a. Pengertian laporan keuangan.....	10
b. Tujuan laporan keuangan	11
c. Karakteristik laporan keuangan	12
d. Prinsip-prinsip laporan keuangan	14
e. Laporan keuangan syariah.....	15
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.....	16
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	18
3. Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	24
B. Penelitian Sebelumnya	29
C. Kerangka Teoritis	33
D. Hipotesa.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35

C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Defenisi Operasional.....	38
G. Teknik Analisa Data.....	40

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.....	46
1. Sejarah Ringkas	46
2. Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	48
3. Deskripsi Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	49
B. Temuan Penelitian	51
1. Deskripsi responden penelitian	51
a. Responden berdasarkan jenis kelamin.....	52
b. Responden Berdasarkan Usia	52
c. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
2. Deskripsi Variabel.....	54
a. Kualitas laporan keuangan.....	54
b. Penerapan standar akuntansi pemerintahan	56
c. Aksesibilitas laporan keuangan.....	57
3. Uji Kualitas Data.....	59
a. Uji Validitas	59
b. Uji Relialibitas	61
4. Uji Asumsi Klasik	62
1. Uji Normalitas	63
2. Uji Multikolinearitas.....	65
3. Uji Heteroskedastisitas	67
5. Uji Hipotesis	69
a. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square).....	69

b. Uji Parsial (t).....	70
c. Uji Simultan (F)	71
6. Uji Regresi Lininer Berganda	72
C. Pembahasan hasil Penelitian.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	29
Tabel 3.1 Waktu penelitian	35
Tabel 3.2 Data Responden Penelitian	36
Tabel 3.3 Skala Likert	37
Tabel 3.4 Variabel dan Indikator Penelitian.....	39
Tabel 3.5 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....	44
Tabel 4.1 Daftar Kuesioner Penelitian.....	52
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	53
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Untuk Varibel Kualitas Laporan Keuangan.....	55
Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Untuk Varibel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	56
Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Untuk Varibel Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP.....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuanga	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel SAP	61
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Aksesibilitas laporan keuangan	61
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas laporan keuangan	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	65
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas	66
Tabel 4.16 Hasil Uji Glejser	68
Tabel 4.17 Koefisien Determinasi R^2	69
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial	70
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan.....	71
Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	33
Gambar 4.1 Histogram Display Normal Curve	63
Gambar 4.2 Normal P-Plot Kualitas Laporan Keuangan.....	64
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini tidak bisa kita dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan. Karena jika faktor-faktor tersebut kurang diterapkan secara maksimal maka dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menjelaskan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya.

Dalam rangka pertanggung-jawaban tersebut diperlukan penerapan kualitas pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan keputusan.

¹Azra Rivai Nasution, "Pengaruh penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah"(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU 2016), h. 1

Salah satu bentuk pertanggung-jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan keuangan.

Kepala SKPD dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawabannya. Kepala SKPD melaksanakan pertanggung-jawaban keuangan yang berhubungan dengan integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur.²

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah.

Dalam pengelolaan keuangan negara, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan adalah hal yang diutamakan. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116. Ayat (4a) pasal 116 berbunyi, untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran, ketidak mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena

²Soeradi, *Pengelolaan keuangan Negara di era otonomi daerah*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2014, h. 9

laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel kepada para pengguna potensial.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, laporan hasil pemeriksaan SPI dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen asset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.³

Jadi, fenomena mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Berdasarkan karakteristik di atas, dapat kita ketahui dengan jelas standar kualitas laporan keuangan yang berlaku secara umum. Hal ini memunculkan pertanyaan selanjutnya, apakah laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan? Apakah pencatatan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai mengikuti prinsip akuntabilitas sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat?

Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data yang tidak menerapkan dan tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga pihak berwenang sulit mengeluarkan opini dikarenakan laporan keuangan tidak sesuai standar dan tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai waktu yang telah ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat ditemukan.

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP berfungsi sebagai landasan teknis implementasi akuntansi berbasis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan,

³Winwin, Yadiati, *Kualitas laporan keuangan*. Jakarta: Kencana. h. 5

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun laporan keuangan salah satunya berpedoman pada Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang terdiri :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tersebut berlaku untuk seluruh satuan kerja kantor pusat dan daerah, unit pelaksanaan teknis, unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tetapi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Sumatera Utara hanya terdiri dari (a) laporan realisasi anggaran (b) neraca (c) laporan operasional (d) laporan perubahan ekuitas dan (d) catatan atas laporan keuangan.⁴

Laporan ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Sumatera Utara tidak sepenuhnya menerapkan PP no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang membuat laporan keuangan tidak berkualitas. Seharusnya pemerintah memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan. Maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat sehingga kualitas laporan keuangan mendapatkan opini yang baik. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu

⁴Dewi Maya Beru Tarigan, Kasubbag Keuangan DISPERINDAGSU, wawancara di Medan, tanggal 10 Maret 2019.

mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut.⁵

Aksesibilitas merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah. Apabila artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalani maksimal. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga negara, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja, kepala daerah melaksanakan beberapa fungsi yaitu perencanaan, penyusunan staf, pengarahan dan pengendalian.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Untuk itu pemerintah alangkah baiknya membuka ruang akses bagi publik dan tidak hanya kepada DPRD/Pemerintah pusat. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hak publik, maka dari itu lembaga sektor publik selaku pihak manajerial harus memberikan ruang yang memadai kepada konstituen/stakeholder baik dari internal maupun eksternal dalam mengakses laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. SKPD Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara tidak sepenuhnya menerapkan aksesibilitas laporan keuangan yang ada dalam peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang sampai saat ini tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara luas misalnya via internet atau media massa, sehingga masyarakat tidak dapat

⁵Yustisia, Pustaka, *standart akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta: Jl. Irian Jaya D-24 Perum Nogatirto Elok II, 2007, h. 14

memenuhi dan mengakses dengan mudah mengenai informasi (kinerja) keuangannya misalnya dengan menggunakan dan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang ada dalam UU no. 33 tahun 2004 dan PP no 56 tahun 2005.

Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability and stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan, Kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia yang berarti kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan, efektivitas pengendalian intern yang merupakan suatu sistem yang penting dan digunakan sebagai alat pengawasan, baik pengawasan yang bersifat preventif, maupun yang bersifat represif, fungsi dari pengendalian intern ini penting untuk penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan pada manajemen, mengenai apa yang dilakukan dan dilaporkan sudah terjamin keakuratannya dan pemanfaatan teknologi informasi yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang dari berbagai pihak untuk mengakses,

mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.⁶

Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berbagai Kebijakan telah ditetapkan pemerintah dalam rangka Mewujudkan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD/APBN secara efisien, efektif, transparan, akuntabel. Namun sejauh ini masih banyak terdapat laporan keuangan yang tidak Semua menerapkan sesuai dengan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Laporan keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tidak sepenuhnya menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ada dalam PP No. 71 tahun 2010.
2. Aksesibilitas laporan keuangan pada dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Sumatera Utara masih rendah.
3. Rendahnya Kualitas laporan keuangan pada dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Sumatera Utara

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu pembatasan untuk memfokuskan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Variabel terikat penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel bebas penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan.

⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Erlangga, 2005, h. 15

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan wawasan serta dorongan ke arah yang lebih baik dan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan kualitas laporan keuangan.

2. Untuk masyarakat umum

Mendorong agar lebih peduli dengan informasi laporan keuangan di pemerintahan, sehingga berpartisipasi dalam mengawasi dan mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

3. Untuk penelitian lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi terutama bagi yang mempunyai minat untuk mengkaji faktor penentu kualitas informasi laporan keuangan dalam menunjang penyelenggaraan sistem penyusunan pelaporan keuangan yang lebih baik, dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum diteliti.

4. Untuk Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini dapat mendorong agar lebih menyadari pentingnya penyajian informasi laporan keuangan yang berkualitas dan menjadi sumbangan pemikiran dan acuan dalam menentukan kebijakan operasional yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi tentang kondisi laporan keuangan yang berkaitan dengan posisi dan kinerja keuangan entitas. Informasi keuangan meliputi aset, kewajiban dan ekuitas entitas, adapun informasi kinerja keuangan meliputi pendapatan dan beban termasuk juga keuntungan dan kerugian yang timbul diluar kegiatan utama entitas. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan hal ini didukung sesuai dengan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.⁷

Sedangkan Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara dan dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan negara dan daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan,

⁷Winwin Yadiati dkk, *Kualitas laporan keuangan*. Kencana, 2017, h. 11

keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan /atau penguasaan objek sebagaimana tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara⁸

b. Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan terdiri dari tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Sedangkan tujuan umum adalah memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan, sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha daalam mencari laba dan memberikan informasi yang diperlukan tentang perubahan harta dan kewajiban, selain itu Tujuan umum laporan keuangan juga menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, memberikan informasi yang berharga dalam laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan yang tepat dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat, menyelesaikan dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.⁹

c. Karakteristik laporan keuangan

Kualitas laporan keungan tercermin dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,

⁸Isnaini Harahap et. al, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22

⁹M. Lathief Ilhamy Nasution, et. Al., *Manajemen Keuangan* (Medan, 2016), h. 13

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik:

a) Memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.

b) Memberikan manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.

c) Disajikan tepat waktu (*timeliness*)

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2) Andal (*Reliability*)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian jujur (*faithfulness of presentation*)

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.

b) Dapat diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Laporan keuangan berkualitas jika dapat diverifikasi kebenarannya jika dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit independen.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan keuangan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadi perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya, kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.¹⁰

¹⁰Deddi Nodiawan, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi kedua, Jakarta; Salemba empat, 2008, h. 132

d. Prinsip-Prinsip Laporan keuangan

1) *Accounting entity* (entitas)

Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah “entity” tertentu atau lembaga tertentu yang dilaporkan, bukan lembaga lainnya.

2) *Going Concern* (Kelangsungan Usaha)

Dalam penyusunan laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan atau entity yang dilaporkan terus beroperasi dimasa-masa yang akan datang. Jika perusahaan dianggap tidak mampu melanjutkan usahanya harus diungkapkan oleh akuntan.

3) *Measurement* (Pengukuran)

Akuntansi adalah sebagai media pengukuran sumber-sumber ekonomi (economic resources) dan kewajiban (liability). Akuntansi harus mengukur hasil transaksi, ukuran yang dipakai adalah unit moneter.

4) *Time Period* (Periode Waktu)

Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu. Laporan keuangan harus memiliki batas waktu yang jelas.

5) *Monetary Unit* (Unit Moneter)

Pengukuran setiap transaksi adalah dalam bentuk nilai atau unit uang.

6) *Accrual*

Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadian-kejadiannya tanpa melihat apakah transaksi pembayaran atau penerimaan kas telah dikeluarkan atau belum.

7) *Exchange Price* (Harga Pertukaran)

Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan didasarkan pada harga pertukaran pada saat terjadinya transaksi.

8) *Aproximation* (Penaksiran)

Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penaksiran-penaksiran. setiap transaksi umum, transaksi harga, pemilihan prinsip yang digunakan dan sebagainya.

9) *Judgment* (Pertimbangan)

Dalam penyusunan laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keahlian, baik keahlian memilih alternatif prinsip maupun pemilihan cara penyajian dalam laporan keuangan.

10) *General Purpose* (Bertujuan Umum)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan buat pemakai secara umum bukan secara khusus.¹¹

e. Laporan keuangan Syariah

Penyajian laporan keuangan syariah sepenuhnya didasarkan pada PSAK No 101 yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Perlunya penyajian laporan keuangan ini adalah agar dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lainnya. Entitas syariah yang dimaksud oleh PSAK ini adalah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut :

1) Pengertian laporan keuangan syariah

Laporan keuangan syariah adalah terstruktur dari posisi laporan keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Pencatatan transaksi merupakan perintah Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang dituangkan dalam lembaran kertas sebagai bukti telah melakukan pencatatan yang disebut dengan bukti transaksi. Dalam konteks yang lebih luas, setiap umat manusia bermuamalat yang menimbulkan transaksi baik dalam skala kecil maupun besar harus mencatatkannya. Secara filosofis tujuan pencatatan adalah untuk menghindari kesalahan karena manusia bersifat lupa baik yang bersifat kewajiban maupun yang menjadi hak bagi setiap manusia yang bermuamalat. Hal ini dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, yaitu:¹²

¹¹ <http://ideaccounting.com/konsep-dan-prinsip-laporan-keuangan/> Diakses pada 09 September 2019, Pukul 13:10 WIB.

¹²Syahman Sitompul, et. al., Akuntansi Mesjid, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

2) Tujuan laporan keuangan syariah

Tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi menyangkut posisi laporan keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

3) Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode.
6. CALK berisi tentang kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
7. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode berjalan.¹³

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas sangat diperlukan di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Menurut Warisno di dalam Skripsi Winda Nindya Zaida, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor .

¹³Muammar Khaddafi, et. Al., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016), h. 87

1) Penerapan standar akuntansi pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

2) Aksesibilitas laporan keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan adalah informasi laporan keuangan yang diberikan instansi atau pemerintah kepada masyarakat secara luas baik melalui surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

3) Kompetensi sumber daya manusia

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, jika tidak dilandasi dengan kompetensi yang memadai seorang tidak akan mampu untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi kelembagaan atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien

Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang terbaik yang dihasilkan oleh suatu sumber daya manusia menunjukkan kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam lingkup kerja dan jabatannya.¹⁴

4) Pemanfaatan teknologi informasi

Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah

¹⁴Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), h. 2

dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang dari berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.¹⁵

5) Efektivitas pengendalian intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa definisi dari SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan kata pengendalian intern merupakan suatu sistem yang penting dan digunakan sebagai alat pengawasan, baik pengawasan yang bersifat preventif, maupun yang bersifat represif. Fungsi dari pengendalian intern ini penting untuk penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan pada manajemen, mengenai apa yang dilakukan dan dilaporkan sudah terjamin keakuratannya.¹⁶

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah, yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan.

SAP merupakan dasar dari pencatatan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Laporan keuangan yang tidak dibuat

¹⁵Windi Nindya Zaida, *“Pengaruh penerapan standart akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada badan pengelola keuangan dan asset daerah kota Medan”*(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU 2018), h. 10

¹⁶Wakhyudi, *Soft Control Aspek Humanisme Dalam Sistem Pengendalian Intern*, Yogyakarta, Diandra Kreatif, h. 18

berdasarkan SAP hasilnya tidak akan dapat dipertanggung-jawabkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.¹⁷

Pengimplementasian SAP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, mendukung operasi rutin harian, meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas *financial* dan melindungi aset pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya SAP maka laporan keuangan akan lebih berkualitas dan dapat dijadikan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan antar pemerintah pusat atau daerah lainnya.

Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan dibuktikan dengan hasil penelitian Azwar Rivai Nasution (2016) menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Fauzi Fahdi Nasution (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, ketika standar akuntansi keuangan diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

¹⁷Dermawan Syahrial, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi kedua, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, h. 23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA
- 2) belanja transfer
- 3) surplus/defisit-LRA
- 4) pembiayaan
- 5) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1). Saldo Anggaran Lebih awal
- 2). Pengguna Saldo Anggaran Berlebih
- 3). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- 4). Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Lain-lain
- 5). Saldo Anggaran Lebih Akhir

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1). kas dan setara kas
- 2). investasi jangka pendek
- 3). piutang pajak dan bukan pajak
- 4). persediaan

- 5). investasi jangka panjang
- 6). aset tetap
- 7). kewajiban jangka pendek
- 8). kewajiban jangka panjang
- 9). ekuitas

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

e. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1). Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- 2). Beban dari kegiatan operasional
- 3). Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- 1). Ekuitas awal
- 2). Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3). Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
- 4). Ekuitas akhir.

g. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.¹⁸

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK). Dengan penerapan SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁹

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Akuntansi pemerintah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis serta pengkomunikasian informasi keuangan yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.²⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No71 Tahun 2010 menyatakan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, yaitu:

a. Basis Akuntansi

¹⁸Soeradi, *pengelolaan keuangan Negara di era otonomi daerah*. Graha ilmu, 2014, H. 43

¹⁹Ibid., h. 45

²⁰Rosmery Elsy, et. al., *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 39

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

b. Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset kewajiban terkait.

c. Realisasi (*realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Substansi mengungguli bentuk formal (*substansi Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan, sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

e. Periodesitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas laoran perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat di tentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode semesteran, bulanan,dan triwulan juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode oleh ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak

berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode yang lama.

g. Pengungkapan Lengkap (*full Disclosure*)

Perlakuan yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode yang lama.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.²¹

3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Aksesibilitas jika dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.

Pada era globalisasi saat ini di mana kecanggihan teknologi yang semakin menggila akhirnya dapat mempermudah pengguna informasi untuk mudah

²¹Soeradi, *Pengelolaan keuangan Negara di era otonomi daerah*. Graha ilmu, 2014, h. 44

mengakses segala kepentingan yang mereka butuhkan yaitu melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan dilakukannya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu, pemerintah daerah maupun SKPD yang mereka miliki dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik. Selain itu laporan keuangan tersebut hendaknya mudah diperoleh masyarakat dengan biaya yang murah.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terkait dalam memberikan ruang akses atau aksesibilitas antara lain sebagai berikut :

- a. Seluruh stakeholder memiliki akses terhadap laporan keuangan.
- b. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses.
- c. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan.

Selain itu, pasal 103 dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya melalui publikasi media surat kabar, internet dan media lainnya. Informasi yang ditampilkan dalam SIKD tersebut dimana dinyatakan secara jelas pada pasal 102, UU No. 33 tahun 2004 meliputi:

- a. APDB dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota
- b. Neraca daerah
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- f. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet) dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi, karena makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua hal yaitu salah satu wujud pertanggungjawaban kepada rakyat dan upaya peningkatan manajemen penegelolaan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktis kolusi, korupsi dan nepotisme.

Asas keterbukaan (transparansi) dalam pemerintahandaerah adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia Negara.²² Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 1 ayat 2) disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas yang efektif tergantung akses publik terhadap laporan pertanggung jawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses atas laporan kinerja organisasi publik dapat diperoleh melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website internet dan forum yang memberikan perhatian langsung atas peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, aksesibilitas merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat.²³

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat sehingga kualitas laporan keuangan mendapatkan opini yang baik.

Peran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas LKPD yang baik akan memberikan sumbangsih atau dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Salah satu alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan

²²Hendra, karianga, *Carut marut pengelolaan keuangan daerah diera otonomi daerah*. Kencana, 2017, h. 40

²³Litjan Poltak Sinambela “*Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*”. Bumi Aksara. 2006, h. 25

penerapan SAP, informasi yang ada di dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan di dalam pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Penerapan SAP diterapkan di lingkungan pemerintah yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bendahara Umum Negara. Jika karakteristik dan tujuan dari laporan keuangan sudah terpenuhi maka akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.²⁴

²⁴Yesi Ramadhani. "Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap penggunaan informasi daerah" Dalam *Jurnal Economic*, Oktober 2014, h. 14

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Windi Nindya Zaidi tahun 2018,²⁵ Azwar Rivai Nasution tahun 2016, Fauzi Fahdi Nasution tahun 2017, Wildan Andika Syaifullah tahun 2016, Faturrahman muafi tahun 2018, Saufi Iqbal Nasution 2019.

Penelitian-penelitian di atas secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Windi Nindya Zaidi (2018)	Pengaruh SAP, kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset kota Medan	Variabel Independen - standart akuntansi pemerintahan - Kompetensi sumber daya Manusia - Pemanfaatan teknologi Informasi Variabel Dependen : - Kualitas laporan Keuangan	Standart akuntansi pemerintahan, Kompetensi SDM, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Azwar Rivai Nasution (2016)	Pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Variabel Independen - Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual Variabel Dependen :	Standart akuntansi Pemerintahan Berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan.

²⁵Windi Nindya Zaidi. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan". "(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU 2018), h. 1

		daerah	- Kualitas laporan Keuangan	
3	Fauzi Fahdi Nasution (2017)	Pengaruh SDM, penerapan aplikasi keuangan dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen - Kompetensi sumber daya manusia - Penerapan aplikasi keuangan - Standart akuntansi Pemerintahan Variabel Dependen : - Kualitas laporan Keuangan	Kompetensi SDM, Penerapan aplikasi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan Standart akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan
4	Wildan Andika Syaifullah (2016)	Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja terhadap akuntabilitas public dikabupaten Sukoharjo	Variabel Independen - Aksesibilitas laporan keuangan - Pengawas fungsional - Audit kinerja Variabel Dependen : - Akuntabilitas Public	Aksesibilitas laporan keuangan, pengawas fungsional audit kinerja Berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan
5	Faturrahman Muafi (2018)	Pengaruh efektivitas pengendalian inter, aksesibilitas laporan keuangan dan good governance	Variabel Independen - Efektivitas pengendalian intern - Aksesibilitas laporan keuangan - good governance Variabel Dependen :	Efektivitas pengendalian intern, good governance Berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan,

		terhadap kualitas laporan keuangan didinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.	- Kualitas laporan Keuangan	sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan Tidak Berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan
6	Saufi Iqbal Nasution (2009)	Pengaruh penyajian SKPD, aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas di SKPD pemerintahan provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen -Pengaruh penyajian neraca -Aksesibilitas laporan Keuangan SKPD Variabel Dependen : -Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan keuangan SKPD	Aksesibilitas Laporan keuangan Berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan
7	Yesi Ramadhani (2014)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap penggunaan informasi keuangan daerah	Variabel Independen -Pengaruh penyajian Laporan keuangan -Aksesibilitas Variabel Dependen : -Penggunaan Informasi keuangan daerah	Aksesibilitas Berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
8.	Olga Yani Pransiska Singkali (2013)	Penerapan Standart Akuntansi pemerintahan	Variabel Independen - Satandart Akuntansi Pemerintahan Variabel Dependen :	Standart akuntansi Pemerintahan Berpengaruh terhadap kualitas

		pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.	- Kualitas laporan Keuangan	Laporan keuangan
9	Umar Sako (2018)	Pengaruh Penerapan Standart Akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Gorontalo	Variabel Independen - Satandart Akuntans Pemerintahan. Variabel Dependen : - Kualitas laporan Keuangan	Standart akuntansi Pemerintahan Berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan antara Windi Nindya Zaidi tahun 2018 dan Azwar Rivai Nasution tahun 2016 dengan variabel penelitian kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel independen, bahwa standar akuntansi pemerintahan menunjukkan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Fauzi Fahdi Nasution tahun 2017 dengan variabel independen tantang standart akuntansi pemerintahan menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Wildan Andika Syaifullah tahun 2016, Faturrahman muafi tahun 2018, Saufi Iqbal Nasution tahun 2019 dengan variabel kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dan aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel independen, bahwa aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan berpengaruh

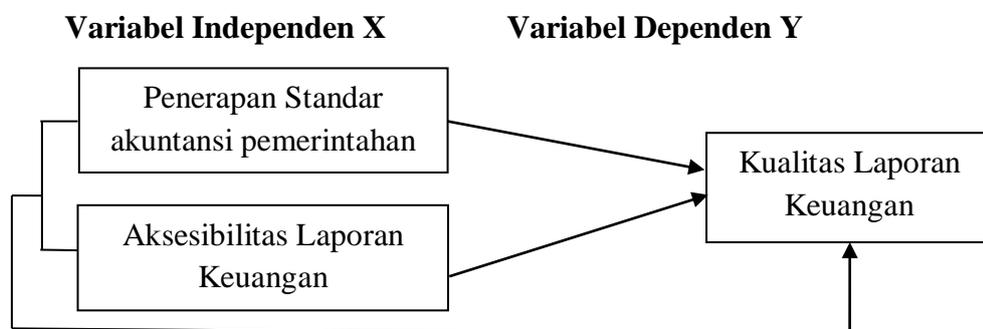
secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Faturrahman muafi tahun 2018, dengan variabel independen tentang aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.

Kualitas laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki hubungan positif atau searah dengan kualitas laporan keuangan SKPD. Artinya apabila laporan keuangan diterapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan akan semakin tinggi. Aksesibilitas laporan keuangan juga memiliki hubungan positif atau searah dengan kualitas laporan keuangan SKPD. Artinya apabila aksesibilitas laporan keuangan semakin terbuka maka kualitas laporan keuangan akan semakin tinggi.

Uraian kerangka penelitian dan hubungan variabel di atas dapat juga digambarkan sebagaimana skema dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

D. Hipotesis

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan diteliti, karena jawaban yang diberikan belum didasarkan dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. atas pernyataan tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

1. Ha: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Ho: Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Ha: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
Ho: Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
3. Ha: Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Ho: Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan asosiatif kausalitas yaitu hubungan timbal balik antara dua variabel atau lebih atau menjelaskan hubungan independen terhadap variabel dependen dalam arti yang saling menguatkan dengan jenis kuantitatif. Desain Kausal berguna untuk mengukur hubungan hubungan antara variable riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya yaitu hubungan sebab akibat.²⁶

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau No. 6 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari menentukan judul penelitian pada bulan Maret 2019 hingga selesai dilakukan.

Tabel 3.1
Waktu penelitian

No	Kegiatan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
1	Pengajuan judul skripsi									
2	Bimbingan proposal skripsi									
3	Seminar proposal skripsi									
4	Bimbingan skripsi									

²⁶Arfan Ikhsan, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan : Cita Pustaka, 2014).h. 86

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan kumpulan-kumpulan elemen yang berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil kesimpulan.²⁷ Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah seluruh staff bagian keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara di berbagai bidang dan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) yang berjumlah 36 orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Data Responden Penelitian

No	Bidang/UPT (Unit Pelayanan Terpadu)	Sampel
1.	Bidang ILMEA	4
2.	Bidang IKAHH	4
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	4
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	4
5.	UPT Perlindungan Konsumen Medan	4
6.	UPT Perlindungan Konsumen Kisaran	4
7.	UPT Perlindungan Konsumen Sibolga	4
8.	UPT Perlindungan Konsumen Pematang Siantar	4
9.	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan	4
Total		36

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati oleh populasi tersebut. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, tentunya peneliti merasa tertarik dalam mengistimiasatu atau lebih nilai-nilai populasi atau menguji satu atau lebih

²⁷Ibid., h. 105

hipotesis statistic. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling* dikarenakan jumlah populasi hanya 36 orang.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam penelitian ini data primer berasal dari staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam merupakan langkah yang paling utama dalam dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan koesioner. Koesioner adalah peartanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab biasanya dalam alternative yang didefenisikan dengan jelas. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.

Daftar pertanyaan yang digunakan dalam pertanyaan terstruktur dan responden tinggal member tanda *checklist* pada jawaban yang dipilih. Kemudian responden langsung mengembalikan daftar pertanyaan setelah diisi. Masing-masing variable diukur dengan model skala *likert*, dengan skala *likert*, maka variable yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator variable, altaernatif jawaban pada setiap pernyataan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3

Skala Likert

Simbol	Alternatif Jawaban	Nilai
SS	Sangat Sutuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

F. Defenisi Operasional

Variabel adalah suatu sifat yang memiliki berbagai macam nilai, kalau diekspresikan secara berlebihan, Variabel adalah sesuatu yang bervariasi. Variabel biasanya diekspresikan dalam bentuk (x dan y) yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai. Variabel independen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi terikat, karena adanya variabel bebas. Berdasarkan desain penelitian asosiatif kausal merupakan desain penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Yang dimaksud dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pemprov Sumatera Utara dengan menggunakan delapan prinsip sebagai berikut:

- a) Basis Akuntansi
- b) Nilai Historis (*Historical Cost*)
- c) Realisasi (*Realization*)
- d) Substansi Mengungguli Bentuk Formal
- e) Periodisitas (*Periodicity*)
- f) Konsistensi (*Consistency*)
- g) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
- h) Penyajian Wajar (*FairPersentation*)²⁸

2. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan transparansi, tidak saja disebabkan karena laporan keuangan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan keuangan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan, tidak sekedar lingkuppemerintah yang

²⁸Deddi Nordiawan, 2008, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba empat. H . 134

mengetahui, tetapi juga memfasilitasi para kepentingan yang lain agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

3. Variabel kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Relevan
- b. Andal (*reliability*),
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Variabel dan indikator penelitian di atas secara rinci dapat dilihat pada table 3.4.

Tabel 3.4.
Variabel dan Indikator Penelitian

Nama Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Penerapan standar Akuntansi pemerintahan	Merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	1. Basis akuntansi 2. Nilai historis 3. Realisasi 4. Substansi Mengungguli bentuk formal 5. Periodeitas 6. Konsistensi 7. Pengungkapan Lengkap 8. Penyajian Wajar	Skala <i>likert</i>
Aksesibilitas Laporan Keuangan	Memberikan kemudahan dalam mencari informasi laporan keuangan.	Variabel ini di ukur dengan : Presepsi dari responden mengenai	Skala <i>likert</i>

		akses publik terhadap laporan keuangan.	
Kualitas Laporan Keuangan	Karakteristik Kualitatif laporan keuangan adalah Ukuran normative Yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dinilai dan dibandingkan 4. Dapat dipahami	Skala <i>likert</i>

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁹ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, statistik deskriptif merupakan suatu proses transformasi dalam penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.³⁰ Dengan pengujian: uji kualitas instrumen, uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis penelitian menggunakan *software* SPSS (*Statistica Product and Service Solution*). Tahapan dalam analisis ini adalah sebagai berikut.

1. Uji kualitas data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah akurasi temuan peneliti yang mencerminkan kebenaran sekaligus responden yang dijadikan objek pengujian berbeda, Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau sah. Validitas dalam penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.³¹ untuk mengetahui sah tidaknya

²⁹Azhari Akmal Tarigan, et. al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La Tansa Press, 2011), h. 99

³⁰Arfan Ikhsan, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: Cita Pustaka, 2014). h. 150

³¹Ibid., 158

instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pernyataan tersebut valid
- b) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pernyataan tersebut tidak valid
- c) r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban seorang responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien *Cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Langkah-langkah melakukan uji reliabilitas terhadap suatu konstruk variabel sama dengan melakukan uji validitas. Output SPSS untuk uji reliabilitas akan dihasilkan secara bersama-sama dengan hasil uji validitas.³²

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah model liner berganda telah memenuhi persyaratan, Uji asumsi klasik terdiri dari: uji normalitas, multikolinieritas, dan heterokedasitas.

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara:

³² Syofiyana Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 173.

1. Grafik histogram, dinyatakan berdistribusi normal jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung seimbang, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan, dan bentuk kurva menyerupai bentuk lonceng.
2. Normal probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual normal. Maka garis yang akan menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
3. Uji Kolmogorov Smirnov, yaitu uji beda antara data normalitasnya dengan normal baku. Uji Kolmogorov Smirnov ini adalah salah satu cara yang paling akurat untuk mengetahui apakah dalam model regresi residual memiliki distribusi normal atau tidak.

Distribusi data dalam uji normalitas dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Nilai sig atau probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data dikatakan normal.
- 2) Nilai sig atau signifikan atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data dikatakan tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor).

- 1) Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10,00$ maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

- 2) Jika nilai tolerance <0,10 dan VIF> 10,00 maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.³³ Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* dengan keuntungan :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun cara lain yang lebih akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan cara Uji Glejser. Uji Glejser ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolute residualnya

3. Uji Regresi Linear Berganda

Model penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Metode regresi linear berganda berguna bagi para pengguna alat untuk dapat melihat variabel yang bersifat kausal. Model regresi linear berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memiliki asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik baik multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.³⁴

Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

³³Arfan Ikhsan, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan:CitaPustaka,2014).h. 183

³⁴Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 103.

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

 α = Konstanta b_1b_2 = Koefisien Korelasi Ganda X_1 = Penerapan standar akuntansi pemerintahan X_2 = Aksesibilitas laporan keuangan

4. Pengujian Hipotesis Penelitian

a. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

- 1) Jika K_d mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat
- 2) Jika K_d mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* kuat.

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (*Independen*) terhadap variabel terikat (*Dependen*), digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Sugiyono.³⁵

Tabel 3.5**Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono 2012

³⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-16,(Alfabeta-Bandung, 2012), h. 250

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

b. Uji Parsial (t-test)

Uji Parsial t disebut juga sebagai uji signifikan individual. Uji ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah :

- 1) H diterima atau H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan nilai probabilitas < sebesar 0,05.
- 2) H ditolak atau H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai probabilitas > sebesar 0,05.

c. Uji Simultan (F-test)

Uji f dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah

- 1) H diterima atau H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan nilai probabilitas < sebesar 0,05.
- 2) H ditolak atau H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, dan nilai probabilitas > sebesar 0,05.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Ringkas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian tugas fungsi dan tata kerja diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 06.256. K Tahun 2002 tanggal 12 Mei 2002. Sebelum terbentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Era Otonomi Daerah, ada 2 (dua) lembaga instansi pemerintah, yang digabung/demerger menjadi 1 (satu) instansi, yaitu :

- a. Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara.

Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah Instansi Pemerintah Pusat yang berada di daerah, yang sebagai perpanjangan tangan Menteri di Daerah Provinsi. Sedangkan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara , adalah Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Induk kepada Gubernur Sumatera Utara. Pada awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi Kepala Dinas adalah Ir. Himamuddin Nasution sebagai Kepala Dinas dan Drs. T. Azwar Aziz sebagai wakil Kepala dinas.

Pada tanggal 26 Maret 2002 Ir.Himanuddin Nasution meninggal dunia, dan jabatan beliau digantikan oleh Drs. T. Azwar Aziz, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/33522/2002 tanggal 27 Desember 2002. Sedangkan jabatan Wakil Kepala Dinas, dijabat oleh Drs. T. Zulkarnaen Damanik, MM yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/3522/2002 tanggal 27 Desember 2002.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/1485/2005 tanggal 09 September 2005 tentang memberhentikan Sdr. Drs. T. Zulkarnaen Damanik, MM dari jabatan sebagai Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/1019/2006 tanggal 1 Mei 2006 jabatan Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diangkat Rommel Sembiring, Msc menggantikan Drs. T. Zulkarnaen Damanik, MM. Selanjutnya berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/1019/2007 tanggal 01 Februari 2007 jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diserahkan terimakan dari Drs. T. Azwar Aziz kepada Drs. H. Mohd. Hasbi Nasution, Msi.

Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara di dasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2012. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah/ kewenangan provinsi, dibidang kebijakan teknis Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, pembinaan ketatausahaan serta Jabatan Fungsional dan Tugas Pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Industri Kecil, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), Industri Kecil, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
3. Penyelenggara pemberian perizinan di bidang industri dan perdagangan.

4. Penyelenggara pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Penyelenggara tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Penyelenggara pelayanan administrasi internal dan eksternal.
7. Penyelenggara tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Struktur Organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang tata hubungan tugas atau kerjasama dari orang-orang yang menggerakkan orang untuk mencapai tujuan. Dengan adanya Struktur Organisasi maka setiap tugas dan Tanggung jawab dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh masing-masing individu yang ada dalam organisasi tersebut.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah sebagai penyelenggara sebagian keenangan pemerintah Provinsi dan tugas desentralisasi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas desentralisasi dan tugas pembantu di bidang perindustrian dan perdagangan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

4. Sekretaris
5. Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.
6. Kepala Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan.
7. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
8. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Deskripsi Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Kepegawaian, Keuangan, Umum, Organisasi dan Hukum serta Program. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Sub Bagian Program

b. Kepala Bidang Industri Logam, mesin, Elektronik, dan ANEKA (ILMEA)

Kepala Bidang Industri Logam, mesin, Elektronik, dan ANEKA (ILMEA) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan fasilitasi sarana, usaha, produksi, serta industri kecil menengah, promosi dan investasi industri logam, mesin, elektronik dan aneka. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Industri Logam, mesin, Elektronik, dan ANEKA (ILMEA) dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Logam Dasar Fero dan Non Fero
- 2) Kepala Seksi Mesin dan Peralatan Rekyasa dan Pancang Bangun
- 3) Kepala Seksi Bimbingan Industri Kecil, menengah, promosi dan investasi.

c. Kepala Bagian Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

Kepala Bagian Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pemberian bimbingan sarana, usaha, produksi, pembinaan industri kecil dan menengah serta promosi dan investasi industri Kimia, Agro dan hasil Hutan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan
2. Kepala Seksi Kimia Haludan Hilir
3. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah

d. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam bidang pembinaan usaha perdagangan, pengadaan dan penyaluran, pendaftaran perusahaan serta sarana perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pengawasan Barang beredar, Jasa dan Perlindungan Konsumen.
2. Kepala Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengadaan, Penyaluran dan Informasi Pasar.

e. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang ekspor dan hasil industri. Ekspor hasil pertanian dan pertambangan , impor serta pengembangan ekspor dan kerja sama luar negeri. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan.
2. Kepala Hasil Ekspor dan Impor Barang Modal, Bahan Baku dan Konsumsi
3. Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional dan Kemitraan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Balai Metrologi Medan
2. Balai Metrologi Pematang Siantar
3. Balai Metrologi Ser tikasi Mutu Barang

Unit pelaksanaan teknis yaitu Balai Metrologi Rantau Prapat, Medan, Pematang Siantar, dan Sibolga adalah unsur pelaksana dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas. Kepala Balai Etrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengujian,

penerapan, kalibrasi, verifikasi, sertifikasi serta pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Metrologi dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume
- c. Kepala Seksi Massa dan Timbangan
- d. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

Kepala Balai pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, mempunyai tugas dan membantu Kepala Dinas dalam pengujian dan sertifikasi Mutu Barang Industri Kimia Agro, Hasil Hutan, Logam Mesin, Elektronika dan Aneka. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Kepala Seksi Jaminan Mutu dan Sarana Teknis
- 3) Kepala Seksi Pengujian
- 4) Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi³⁶

B. Temuan Penelitian

1. Deskripsi Responden Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koesioner yang disampaikan langsung kepada responden. Koesioner yang telah diisi oleh responden akan dikumpulkan kembali yang selanjutnya akan ditabulasi dalam *Microsoft Office Excel* yang diolah dengan menggunakan program *SPSS for windows*. Adapun waktu yang dibutuhkan penulis untuk mengumpulkan koesioner-koesioner tersebut lebih kurang selama dua minggu. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 36 koesioner kepada responden yang berada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Dari 36 koesioner yang dibagikan, 36 koesioner yang kembali.

Adapun daftar koesioner pada table 4.1 dapat dilihat di bawah ini.

³⁶<http://disperindag.sumutprov.go.id/> Diakses pada 20 November 2019, Pukul 13:10 WIB.

TABEL 4.1
Daftar Kuesioner Penelitian

No	Keterangan kuesioner	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar	36
2.	Kuesioner yang kembali	36
3.	Kuesioner yang tidak kembali	0
4.	Kuesioner yang dapat di olah	36

Gambaran umum responden yang menjadi obyek penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan.

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pemetaan responden berikut ini yang ditunjukkan pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Deskripsi Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	25	69.45%
2	Perempuan	11	30.55%
Total		36	100%

Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas dapat diketahui jenis kelamin responden dipejabat penatausahaan keuangan dan staff pembuat laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang diambil sebagai responden, menunjukkan sebanyak 36 orang berjenis kelamin laki-laki 25 atau 69.45%, sedangkan sisanya adalah perempuan sebanyak 11 orang atau 30.55% Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dipejabat penatausahaan keuangan dan staff pembuat laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini adalah laki-laki.

b. Reponden Berdasarkan Usia

Gambaran umum responden berdasarkan usia dapat dilihat dari hasil pemetaan responden berikut ini yang ditunjukkan pada table 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Deskripsi Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 30	11	30.55%
2	30-40	18	50.01%
3	> 40	7	19.44%
Total		36	100%

Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, dapat diketahui dipejabat penatausahaan keuangan dan staff pembuat laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi responden adalah berusia 20-30 tahun sebanyak 11 orang atau 30.55%, berusia 31-40 tahun sebanyak 18 orang atau 50.01%, sedangkan yang berusia > 41 tahun sebanyak 7 atau 19.44%.

c. Reponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan mencerminkan intelektualitas dari seseorang Gambaran umum responden berdasarkan usia dapat dilihat dari hasil pemetaan responden berikut ini yang ditunjukkan pada table 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Deskripsi Responden

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SLTA/Sederajat	5	13.89%
2	D3	2	5.55%
3	S1	25	69.45%
4	S2	4	11.11%
5	S3		
Total		36	100%

Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.4, dapat diketahui bahwa pejabat penatausahaan keuangan dan staff pembuat laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi responden adalah berpendidikan S1 sebanyak 25 orang atau 69.45%, berpendidikan Diploma

sebanyak 2 orang atau 5.55%, berpendidikan SMA sebanyak 5 orang atau 13.89% dan yang berpendidikan S2 ada 4 orang atau 11.11%.

2. Deskripsi Variabel

Analisis ini dilakukan untuk menganalisis data berdasarkan kecendrungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel. Hal ini untuk mengetahui variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan). Data-data yang dikumpulkan, disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi berikut ini:

a. Kualitas laporan keuangan (Y)

Pertanyaan koefisien untuk variabel kualitas laporan keuangan terdiri dari 7 butir pernyataan, yaitu:

- 1) Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu.
- 3) Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
- 4) Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material.
- 5) Di tempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diverifikasi.
- 6) Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- 7) Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna.

Hasil jawaban responden untuk variabel kualitas laporan keuangan dapat dirangkum dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5

Distribusi jawaban responden untuk variabel kualitas laporan keuangan

Pernyataan	Jawaban											
	SS		S		N		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	N	%
1	9	25	27	75	-	-	-	-	-	-	36	100
2	9	25	24	66	3	9	-	-	-	-	36	100
3	8	22,2	28	77,7	-	-	-	-	-	-	36	100
4	7	19	26	72	3	9	-	-	-	-	36	100
5	4	11	16	44	12	33	4	12	-	-	36	100
6	12	34	18	50	6	16	-	-	-	-	36	100
7	12	34	24	66	-	-	-	-	-	-	36	100

Sumber data :Diolah oleh penulis, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dijelaskan bahwa jumlah responden sebanyak 36 orang, dapat diketahui variabel kualitas laporan keuangan (Y) untuk pernyataan ke 1 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 27 atau 75% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (normal, tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 2 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 24 atau 66% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 3 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 28 atau 77,7% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (normal, tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 4 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 26 atau 72% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 5 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 16 atau 44% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (sangat tidak setuju). Pernyataan ke 6 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 18 atau 50% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 7 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 24 atau 66% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (normal, tidak setuju dan sangat tidak setuju).

b. Penerapan standar akuntansi pemerintahan

Pernyataan koesioner untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari 6 pernyataan, yaitu:

- 1) Standar akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
- 2) Laporan keuangan disusun dengan karakteristik laporan keuangan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
- 3) Informasi keuangan disajikan tepat waktu sesuai kebutuhan dalam mengambil keputusan.
- 4) Pencatatan informasi keuangan telah didukung dengan bukti-bukti yang sesuai ketentuan.
- 5) Laporan keuangan SKPD menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 6) Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ada di SKPD disajikan dan diterapkan secara maksimal dan lengkap.

Hasil jawaban responden untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.6

Distribusi jawaban responden untuk variabel Penerapan SAP

Pernyataan	Jawaban											
	SS		S		N		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	N	%
1	17	47,2	19	52,8	-	-	-	-	-	-	36	100
2	19	52,8	17	42,2	2	5	-	-	-	-	36	100
3	17	47,2	18	50	1	2,8	-	-	-	-	36	100
4	19	52,8	17	47,2	-	-	-	-	-	-	36	100
5	12	34	24	66	-	-	-	-	-	-	36	100
6	15	41,6	21	58,4	-	-	-	-	-	-	36	100

Sumber data :Diolah oleh penulis, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dijelaskan bahwa jumlah responden sebanyak 36 orang, dapat diketahui variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) untuk pernyataan ke 1 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 19 atau 52,8% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (normal, tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 2 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 19 atau 52,8% (sangat setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 3 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 18 atau 50% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 4 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 19 atau 52,8% (sangat setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (normal, tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 5 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 24 atau 66% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (normal, tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 6 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 21 atau 58,4% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (normal, tidak setuju dan sangat tidak setuju).

c. Aksesibilitas laporan keuangan

Pernyataan koesioner untuk variabel Aksesibilitas laporan keuangan terdiri dari 7 pernyataan, yaitu:

- 1) Laporan keuangan dapat dilihat di Kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet.
- 3) Memberikan kemudahan para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan.
- 4) Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media masa
- 5) Laporan keuangan yang dibuat dapat dilihat dan dipahami dipapan pengumuman.
- 6) Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- 7) Laporan yang dibuat dan dipublikasikan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi yang bersifat financial.

Tabel 4.7

Distribusi jawaban responden untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan

Pernyataan	Jawaban											
	SS		S		N		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	N	%
1	9	25	24	66	3	9	-	-	-	-	36	100
2	9	25	21	58,3	6	16,7	-	-	-	-	36	100
3	2	5,5	31	85,5	3	9	-	-	-	-	36	100
4	7	19,4	26	58,4	8	22,2	-	-	-	-	36	100
5	7	19,4	22	61,2	7	19,4	-	-	-	-	36	100
6	4	11,8	24	66	8	22,2	-	-	-	-	36	100
7	4	11,8	27	75	5	13,2	-	-	-	-	36	100

Sumber data :Diolah oleh penulis, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dijelaskan bahwa jumlah responden sebanyak 36 orang, dapat diketahui variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) untuk pernyataan ke 1 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 24 atau 66% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 2 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 21 atau 58,3% (sangat setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 3 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 31 atau 85,5% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 4 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 26 atau 58,4% (sangat setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 5 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 22 atau 61,2% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 6 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 24 atau 66% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Pernyataan ke 7 menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 27 atau 75% (setuju) dan frekuensi paling rendah sebesar 0% (tidak setuju dan sangat tidak setuju).

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kelayakan setiap butir angket yang diajukan, sehingga suatu variabel dapat diidentifikasi. Alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner adalah angka hasil korelasi antara skor kuesioner dengan skor keseluruhan responden terhadap informasi dalam kuesioner. Ukuran valid tidaknya suatu pertanyaan dapat dilihat dari output SPSS berupa nilai item total statistic masing-masing butir kuesioner.

Suatu butir kuesioner dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai r_{tabel} untuk uji dua arah pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ($p=0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau N. Nilai r_{tabel} dua arah pada $N=36$ dan $p=0,05$ adalah 0,329. Hasil output SPSS yang diperoleh untuk uji validitas dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan (X1 dan X2) kualitas laporan keuangan (Y) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.5, 4.6 dan tabel 4.7.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP (X₁)

No. Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel} 5% (36)	Signifikansi	Kriteria
1	0,589	0,329	0,000	Valid
2	0,693	0,329	0,000	Valid
3	0,791	0,329	0,000	Valid
4	0,691	0,329	0,000	Valid
5	0,677	0,329	0,000	Valid
6	0,574	0,329	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 23, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6, dapat disimpulkan bahwa semua butir kuesioner yang digunakan dalam variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan valid.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X₂)

No. Butir Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel 5% (36)}	Signifikansi	Kriteria
1	0,641	0,329	0,000	Valid
2	0,713	0,329	0,000	Valid
3	0,566	0,329	0,000	Valid
4	0,719	0,329	0,000	Valid
5	0,784	0,329	0,000	Valid
6	0,764	0,329	0,000	Valid
7	0,722	0,329	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 23, 2019

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No. Butir Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel 5% (36)}	Signifikansi	Kriteria
1	0,726	0,329	0,000	Valid
2	0,903	0,329	0,000	Valid
3	0,680	0,329	0,000	Valid
4	0,768	0,329	0,000	Valid
5	0,412	0,329	0,020	Valid
6	0,770	0,329	0,000	Valid
7	0,868	0,329	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 23, 2019

Berdasarkan tabel 4.7, maka dapat disimpulkan semua butir kuesioner yang digunakan dalam variabel kualitas laporan keuangan (Y) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat kestabilan dan konsistensi dari responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang disusun

dalam suatu bentuk kuesioner. Hasil uji ini akan mencerminkan dapat atau tidaknya suatu instrument penelitian dipercaya, berdasarkan tingkat ketepatan dan kemantapan suatu alat ukur.

Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidaknya suatu instrument penelitian, salah satunya dengan melihat perbandingan antara nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Jika pengujian dilakukan dengan metode *Alpha Cronbach* maka r_{hitung} akan diwakili oleh nilai *Alpha*. Suatu kuesioner dapat dikatakan handal (*reliabel*) apabila memiliki kehandalan atau *alpha* sebesar 0,6 atau lebih. Nilai *Alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal realibilitasnya.

Adapun tingkat reliabilitas pertanyaan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), dan variabel kualitas laporan keuangan (Y) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil olahan data SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Variabel SAP (X₁)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.767	6

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan nilai reliabilitas. Nilai reliabilitas dilihat dari koefisien *Alpha Cronbach*. Dengan jumlah data yang diolah sebanyak 36 dan butir pertanyaan (N of items) sebanyak 6, koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,767. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Alpha Cronbach* > 0,6. Jika mengacu pada syarat tersebut, maka keseluruhan butir pertanyaan pada data diatas adalah reliabel (handal).

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Aksesibilitas laporan keuangan (X₂)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.774	7

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai reliabilitas. Nilai reliabilitas dilihat dari koefisien *Alpha Cronbach*. Dengan jumlah data yang diolah sebanyak 36 dan butir pertanyaan (N of items) sebanyak 7, koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,774. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Alpha Cronbach* $> 0,6$. Jika mengacu pada syarat tersebut, maka keseluruhan butir pertanyaan pada data diatas adalah reliabel (handal).

Tabel 4.13

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas laporan keuangan (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.771	7

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan nilai reliabilitas. Nilai reliabilitas dilihat dari koefisien *Alpha Cronbach*. Dengan jumlah data yang diolah sebanyak 36 dan butir pertanyaan (N of items) sebanyak 7, koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,771. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Alpha Cronbach* $> 0,6$. Jika mengacu pada syarat tersebut, maka keseluruhan butir pertanyaan pada data diatas adalah reliabel (handal).

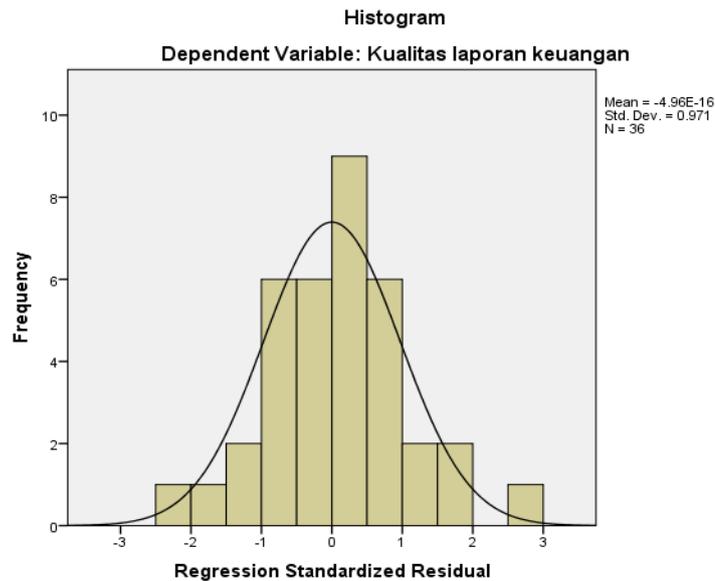
4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bisa dan konsisten.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji analisis data, artinya sebelum melakukan analisis sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi normal atau tidak.

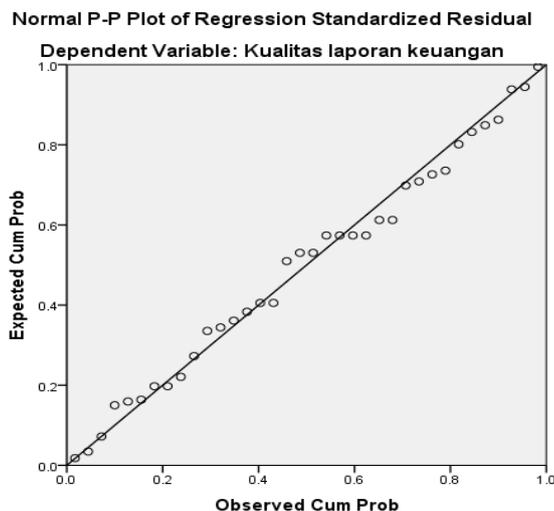
Normalitas dapat dilihat dari normal p-plot dan grafik histogram. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila gambar terdistribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Data juga dapat dikatakan normal jika berbentuk kurva yang kemiringannya cenderung seimbang, baik kemiringan sisi kiri maupun kanan, dan bentuk kurva hampir menyerupai lonceng yang sempurna.



Gambar 4.1

Histogram Display Normal Curve

Berdasarkan gambar 4.1 histogram di atas, dapat diketahui bahwa kurva kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memiliki kemiringan yang seimbang dari sisi kanan dan kiri, serta garisnya juga menyerupai lonceng, artinya berdistribusi normal. Normalitas data juga dapat dilihat dari *output* kurva *normal P-Plot*. Data pada variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.



Gambar 4.2

Normal P-Plot Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah dengan garis diagonal, artinya kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terdistribusi secara normal dan data variabel normal.

Selain itu teknik uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov Test*. Kelebihan dari uji ini sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas grafik. Uji *Kolmogorov Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.

Penerapan pada uji *Kolmogorov Smirnov* adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Namun, jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, artinya data yang kita uji normal.

Tabel 4.14
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28095733
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.066
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 23, 2019

Berdasarkan tabel 4.11 di atas besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,79 dengan signifikan pada 0,200. Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 5% (0,05) Karena $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan digunakannya uji ini adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk lebih jelasnya berikut tabel hasil uji Multikolonieritas.

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.564	5.915		.772	.446		
Penerapan standar akuntansi pemerintahan	.478	.190	.359	2.514	.017	.972	1.029
Aksesibilitas laporan keuangan	.411	.143	.411	2.881	.007	.972	1.029

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Sumber : Output SPSS 23, 2019

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas menunjukkan hasil uji multikolonieritas. Salah satu cara untuk melihat apakah model regresi terkena multikolinieritas maka dapat dilihat dari :

a. Nilai *Tolerance*

- 1) Jika *tolerance* > 0,10 maka variabel memenuhi asumsi bebas multikolonieritas.
- 2) Jika *tolerance* < 0,10 maka variabel tidak memenuhi asumsi bebas multikolonieritas.

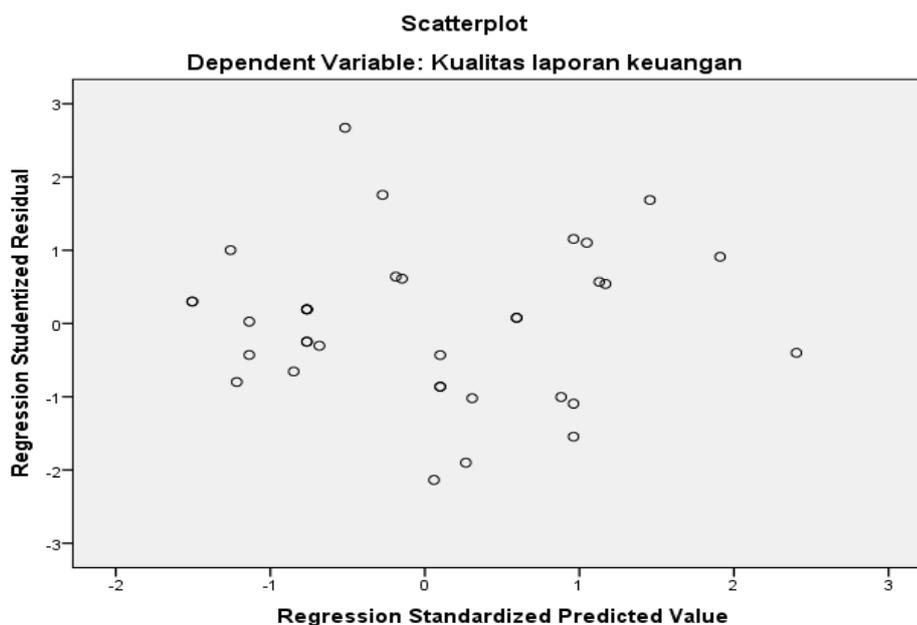
Melihat dari tabel diatas pada kolom *Collinearity Statistics* nilai tolerance pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan berada diatas 0,10 yaitu 0,972 sehingga bisa disimpulkan bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi bebas multikolonieritas karena nilai *tolerance* > 0,10 atau $0,972 > 0,10$.

b. *Variance Inflation Factor (VIF)*

- 1) Jika $VIF < 10,00$ maka variabel memenuhi asumsi bebas multikolinieritas.
- 2) Jika $VIF > 10,00$ maka variabel tidak memenuhi asumsi bebas multikolinieritas.

Melihat dari tabel diatas hasil uji multikolonieritas pada kolom *Collinearity Statistics* sub kolom VIF nilai *Variance inflation Factor* pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan berada dibawah 10,00 yaitu 1,029 sehingga bisa disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi masalah multikolonieritas. Hal ini konsisten dengan uji yang dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor (VIF)* menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10,00 demikian juga dengan nilai Tolerance nya lebih besar dari 0,10. Maka dari output diatas dapat dinyatakan bahwa data terbebas dari multikolinieritas.

c. **Uji Heteroskedastisitas**



Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas. Dari grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi kualitas laporan keuangan berdasarkan masukan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan.

Selain itu teknik uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji *glejser* yaitu salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Uji *glejser* dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen (bebas) dengan nilai *absolute residual* nya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual $> 0,05$ maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Tabel 4.16
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.961	3.571		- 1.109	.275
Penerapan standar akuntansi pemerintahan	.146	.115	.217	1.274	.212
Aksesibilitas laporan keuangan	.065	.086	.128	.752	.457

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel 4.13 di atas diketahui nilai signifikansi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan ($0,212$) $> 0,05$ dan nilai signifikansi variabel aksesibilitas laporan keuangan ($0,457$) $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, selanjutnya pengujian yang dilakukan adalah pengujian hipotesis penelitian yang meliputi, koefisien determinasi, uji parsial (t) dan uji simultan (F) dan hasil dari pengujian tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.

a. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Korelasi linear berganda digunakan untuk menghitung keeratan hubungan variabel penerapan standart akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Nilai R^2 semakin mendekati 1, berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai Adjusted R square karena lebih dapat dipercaya dalam mengevaluasi model regresi.

Tabel 4.17

Koefisien Determinasi R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 ^a	.347	.308	2.34906

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas laporan keuangan (X2), Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1)

Sumber : Output SPSS 23, 2019

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas *Model Summary* kolom *R* menunjukkan besarnya koefisien korelasi ganda sebesar 0,589, berada dalam interval 0,40-0,599

yang menurut pedoman interpretasi menunjukkan angka korelasi sedang. Hasil analisis variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan bahwa nilai adjusted *R Square* sebesar 0,308. Hal ini berarti seluruh variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X_2) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 30,8% terhadap variabel terikat (Y) yakni kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 68,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini.

b. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan uji t (uji parsial) melalui diperoleh hasil variabel bebas yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X_2) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y). criteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} berdasarkan signifikansi 0,05 dan 2 sisi dengan derajat kebebasan $df (n-k-1) = 36-2-1 = 33$ (adalah jumlah data dan variabel independen). Sehingga t_{tabel} yang diperoleh dari tabel statistic adalah sebesar 2,034, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima sedangkan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.564	5.915		.772	.446
	Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1)	.478	.190	.359	2.514	.017
	Aksesibilitas laporan keuangan (X_2)	.411	.143	.411	2.881	.007

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan (Y)

Sumber : Output SPSS 23, 2019

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas hasil t_{hitung} pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,514 > 2,034$) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,017 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan atau dengan kata lain (H_{a1}) diterima.
2. Variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,881 > 2,034$) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan atau dengan kata lain (H_{a2}) diterima.

c. Uji Simultan (F)

Uji simultan (F) digunakan untuk menguji secara bersama-sama signifikan pengaruh variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengujian ini menggunakan alat uji statistic metode Fisher (uji F) pada tingkat signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} yang dapat diketahui dengan menghitung dfl (jumlah total variabel) = $3-1 = 2$, dan df_2 ($n-k-1$) = $36-2-1 = 33$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Tabel 4.19

Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	96.903	2	48.452	8.781	.001 ^b
Residual	182.097	33	5.518		
Total	279.000	35			

- a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan (Y)
- b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas laporan keuangan (X₂), Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X₁)

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menunjukkan hasil uji simultan. nilai F_{hitung} sebesar 8.781 dengan signifikan sebesar 0,001, Nilai signifikan tersebut $< 0,05$, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama penerapan standar akuntansi pemerintahan (X₁), aksesibilitas laporan keuangan (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

6. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan standart akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari gejala multikolinieritas dan terbebas dari heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.564	5.915		.772	.446
Penerapan standar akuntansi pemerintahan	.478	.190	.359	2.514	.017
Aksesibilitas laporan keuangan	.411	.143	.411	2.881	.007

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Sumber : Output SPSS 23, 2019

Berdasarkan tabel 4.14 di atas yang diperoleh dari hasil pengolahan dan komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 23,0 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 4,564 + 0,478 X_1 + 0,411 X_2 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 4,564 menunjukkan bahwa ketika variabel standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan laporan keuangan konstan atau = 0, maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 4,564 satuan.
2. Nilai koefisien regresi standar akuntansi pemerintahan (b_1) sebesar 0,478 artinya jika variabel standar akuntansi pemerintahan meningkat 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,478 satuan dengan asumsi X_2 konstan.
3. Nilai koefisien regresi aksesibilitas laporan laporan (b_2) sebesar 0,411 artinya jika variabel aksesibilitas laporan laporan meningkat 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,411 satuan dengan asumsi X_1 konstan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara simultan dan parsial semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun penjelasan mengenai hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , ($2.514 > 2.034$) atau ($sig\ 0.017 < 0.05$). Hali ini menunjukkan bahwa variabel

standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan kata lain, hipotesis (Ha₁) diterima.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan positif, yaitu semakin baik Penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Windi Nindya Zaidi tahun 2018 “Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota medan.” dari hasil penelitian dihasilkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.³⁷

2. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , ($2.881 > 2.034$) atau ($sig\ 0.007 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan kata lain, hipotesis (Ha₂) diterima.

Penerapan aksesibilitas laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan positif, yaitu semakin baik aksesibilitas laporan keuangan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Faturrahman Muafi, 2018 “Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas pengendalian intern, aksesibilitas laporan keuangan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan diDinas Sosial Perdagangan Provinsi

³⁷Windi Nindya Zaidi, *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota medan*, Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, 2018

Sumatera Utara". dari hasil penelitian dihasilkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian diperoleh F_{hitung} 8,781 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), sedangkan F_{tabel} 5% ($\alpha = 0,05$) adalah sebesar 3,28, hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,781 > 3,28$), perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil uji determinan R^2 pada penelitian ini diperoleh nilai determinan R^2 menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,308 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 30,8% sedangkan sisanya 69,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa berpengaruh variabel-variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil uji t secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
2. Berdasarkan hasil uji t secara parsial variabel Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
3. Berdasarkan hasil uji F secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan Aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengemukakan beberapa saran berikut ini:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Dalam upaya memperbaiki kualitas informasi keuangan peneliti memberi beberapa saran.
 - a. Para penyusun laporan keuangan yang terdiri dari staff bagian keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda bahkan disiplin ilmu yang berbeda beda pula (tidak hanya berasal dari latar belakang ilmu akuntansi). Dengan demikian apabila yang bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi

ditempatkan sebagai staff pelaporan keuangan hendaknya dapat diberikan pembekalan yang cukup mengenai dasar-dasar akuntansi.

- b. Entitas akuntansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara perlu mengimplementasikan SAP secara menyeluruh dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan serta terus melakukan penelaahan dalam rangka perbaikan SAP.

2. Saran untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya. Untuk perbaikan selanjutnya peneliti memberi beberapa saran yaitu:

- a. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi.
- b. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan, misalnya pemanfaatan teknologi informasi, pengalaman kerja aparatur ataupun kompetensi sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Erlangga, 2005
- Elsye, Rosmery "Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah" Bogor: Ghalia Indonesia, 2016
- Harahap, Isnaini "Hadis-hadis Ekonomi" Jakarta: Kencana, 2017
- Hendra, karianga, *Carut marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah*. Kencana, 2017
- <http://ideaccounting.com/konsep-dan-prinsip-laporan-keuangan/> Diakses pada 09 September 2019
- <http://disperindag.sumutprov.go.id/> Diakses pada 20 November 2019
- Ikhsan, Arfan. *Metodologi Penelitian Bisnis Medan* : Cita Pustaka, 2014
- Muammar, Khaddafi, et. Al., *Akuntansi Syariah Medan*: Madenatera, 2016
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Keuangan*, Medan, 2016
- Nodiawan, Deddi, *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi kedua, Jakarta; Salemba empat, 2008
- Nasution, Azra Rivai, "Pengaruh penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah"(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU 2016)
- Ramadhani, Yesi. "Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitis terhadap penggunaan informasi daerah" Dalam *Jurnal Economic*, Oktober 2014
- Sinambela, Litjan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

- Siregar, Syofiyah, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sitompul, Syahman "Akuntansi Masjid, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015
- Soeradi, *pengelolaan keuangan Negara di era otonomi daerah*. Graha ilmu, 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-16, Bandung, 2012
- Sutrisno, Edy "Manajemen Sumber Daya Manusia" Jakarta: Prenadamedia, 2009
- Syahrial, Dermawan, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi kedua, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013
- Tarigan, Azhari Akmal, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La Tansa Press, 2011
- Teguh, Muhammad, *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Wakhyudi, *Soft Control Aspek Humanisme Dalam Sistem Pengendalian Intern*, Yogyakarta, Diandra Kreatif, 2018
- Yadiat, Winwin, *Kualitas laporan keuangan*. Jakarta: Kencana, 2017
- Yustisia, Pustaka, *standart akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta: Jl. Irian Jaya D-24 Perum Nogotirto Elok II, 2007
- Zaida, Windi Nindya, "Pengaruh penerapan standart akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada badan pengelola keuangan dan asset daerah kota Medan"(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU 2018)
- Republik Indonesia, *UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*

Republik Indonesia, *UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.*

Republik Indonesia, *UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Pasal 9.*

Republik Indonesia, *UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Negara.*

Republik Indonesia, *PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.*

Republik Indonesia , *PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah.*

Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang pedoman
pengelolaan keuangan*

Republik Indonesia *Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Pedoman Akuntansi
Berbasis AkruaI*

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

I. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar berikut:

(Berikan tanda *check-list* (√) pada kotak yang tersedia)

1. Nama :
2. Umur : < 30 Tahun 30-40 Tahun >40 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat D3 S-1
 S-2 S-3
5. Jabatan/tugas pokok dari : Pejabat Penatausahaan Keuangan
Bapak/Ibu di SKPD Staff Pembuat Laporan Keuangan
6. Lama Bapak/Ibu bekerja : < 2 Tahun 2-5 Tahun 5-10 Tahun

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon memberi tanda *check-list* (√) sesuai pendapat dari Bapak/Ibu pada tabel yang sudah tersedia (satu jawaban pada setiap nomor pernyataan).
2. Setelah mengisi mohon bapak/ibu dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan koesioner ini pertama kali.
3. Keterangan alternatif jawaban dan skor:
 - a. STS : Sangat Tidak Setuju (1)
 - b. TS : Tidak Setuju (2)
 - c. N : Netral (3)
 - d. S : Setuju (4)
 - e. SS : Sangat Setuju (5)

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan						
1	Standar akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.					
2	Laporan keuangan disusun dengan karakteristik laporan keuangan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.					
3	Informasi keuangan disajikan tepat waktu sesuai kebutuhan dalam mengambil keputusan.					
4	Pencatatan informasi keuangan telah didukung dengan bukti-bukti yang sesuai ketentuan.					
5	Laporan keuangan SKPD menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.					
6	Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ada di SKPD disajikan dan diterapkan secara maksimal dan lengkap.					

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

1	Laporan keuangan dapat dilihat di Kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara.					
---	---	--	--	--	--	--

2	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet.					
3	Memberikan kemudahan para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan.					
4	Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media masa.					
5	Laporan keuangan yang dibuat dapat dilihat dan dipahami dipapan pengumuman.					
6	Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna.					
7	Laporan yang dibuat dan dipublikasikan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi yang bersifat financial.					

3. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
A. Relevan						
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.					
2	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu.					
B. Andal						
3	Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja					

	tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					
4	Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material.					
5	Di tempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diverifikasi.					
C. Dapat Dibandingkan						
6	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
D. Dapat Dipahami						
7	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna.					

Lampiran 2

Data penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

No	Penerapan Standar Skuntansi Pemerintahan						Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	5	5	5	4	4	27
2	4	5	4	4	5	5	27
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	5	5	5	5	5	29
8	5	5	5	5	5	4	29
9	5	3	4	5	4	4	25
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	4	4	5	5	4	4	26
16	4	4	4	4	5	5	26
17	5	5	4	4	4	4	26
18	5	5	5	5	4	4	28
19	5	4	5	5	5	4	28
20	5	4	5	5	4	4	27
21	5	3	4	5	4	4	25
22	4	5	5	5	4	4	27
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	4	5	4	5	4	27
28	5	5	5	5	4	5	29
29	4	5	4	5	4	5	27
30	5	4	5	4	5	5	28
31	5	4	4	4	5	4	26

32	5	4	4	4	4	5	26
33	4	4	3	4	4	5	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	5	4	5	4	5	27
36	4	4	5	5	4	5	27

No	Aksesibilitas Laporan Keuangan							Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	3	3	3	3	3	23
3	4	4	4	5	4	3	4	28
4	4	4	5	4	4	4	5	30
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	4	5	4	4	4	4	4	29
7	5	5	5	5	5	5	5	35
8	4	4	4	5	5	4	4	30
9	4	3	4	3	3	4	4	25
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	5	4	4	4	4	3	4	28
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	5	5	4	5	4	5	5	33
16	5	4	4	3	4	4	4	28
17	4	4	4	5	5	4	4	30
18	4	5	4	4	5	5	4	31
19	4	4	3	3	3	3	3	23
20	4	4	4	5	4	3	4	28
21	5	4	4	5	5	4	4	31
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	3	4	4	4	4	3	3	25
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	3	3	4	3	3	3	4	23
27	3	3	4	3	3	3	4	23
28	5	5	4	4	5	5	5	33
29	5	5	4	4	4	4	4	30
30	4	5	4	5	4	4	4	30
31	4	3	3	4	4	4	4	26

32	4	5	4	4	4	4	4	29
33	4	3	4	4	3	4	4	26
34	4	4	4	3	3	4	3	25
35	5	5	4	4	4	4	4	30
36	5	3	4	3	5	4	3	27

NO	Kualitas Laporan Keuangan							Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
1	4	4	4	4	4	3	4	27
2	4	4	4	4	2	4	4	26
3	4	4	4	4	3	4	4	27
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	5	5	5	5	4	5	5	34
7	5	5	5	5	2	5	5	32
8	4	5	5	4	4	5	5	32
9	4	3	4	3	4	3	4	25
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	4	4	4	3	4	4	27
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	5	5	4	4	5	5	5	33
15	4	5	5	4	5	5	5	33
16	4	4	5	5	4	4	4	30
17	4	4	4	4	3	4	4	27
18	5	5	5	5	3	4	5	32
19	4	4	4	4	2	4	4	26
20	4	4	4	4	4	3	4	27
21	4	3	4	3	4	3	4	25
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	4	4	4	4	3	4	4	27
25	4	4	4	4	3	4	4	27
26	5	5	5	5	2	5	5	32
27	4	4	4	4	3	4	4	27
28	5	5	4	5	5	5	5	34
29	4	4	4	4	4	5	5	30
30	4	4	4	4	3	5	4	28
31	4	4	4	4	3	4	4	27

32	4	3	4	3	3	3	4	24
33	5	4	5	4	4	3	4	29
34	4	4	4	4	3	4	4	27
35	4	4	4	4	4	5	5	30
36	5	4	4	4	3	5	5	30

Lampiran 3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.767	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.774	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.771	7

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28095733
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.066
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

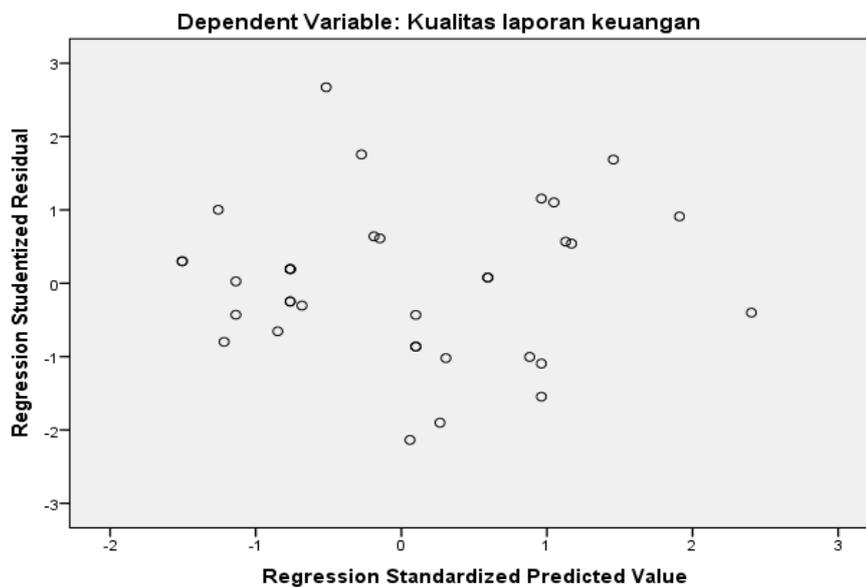
d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.564	5.915		.772	.446		
Penerapan standar akuntansi pemerintahan	.478	.190	.359	2.514	.017	.972	1.029
Aksesibilitas laporan keuangan	.411	.143	.411	2.881	.007	.972	1.029

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Scatterplot



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.961	3.571		-1.109	.275
	Penerapan standar akuntansi pemerintahan	.146	.115	.217	1.274	.212
	Aksesibilitas laporan keuangan	.065	.086	.128	.752	.457

a. Dependent Variable: RES2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 ^a	.347	.308	2.34906

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas laporan keuangan (X2), Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.564	5.915		.772	.446
	Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1)	.478	.190	.359	2.514	.017
	Aksesibilitas laporan keuangan (X2)	.411	.143	.411	2.881	.007

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan (Y)

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.564	5.915		.772	.446
	Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1)	.478	.190	.359	2.514	.017
	Aksesibilitas laporan keuangan (X2)	.411	.143	.411	2.881	.007

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	96.903	2	48.452	8.781	.001 ^b
	Residual	182.097	33	5.518		
	Total	279.000	35			

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas laporan keuangan (X2), Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.564	5.915		.772	.446
	Penerapan standar akuntansi pemerintahan	.478	.190	.359	2.514	.017
	Aksesibilitas laporan keuangan	.411	.143	.411	2.881	.007

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.564	5.915		.772	.446
	Penerapan standar akuntansi pemerintahan	.478	.190	.359	2.514	.017
	Aksesibilitas laporan keuangan	.411	.143	.411	2.881	.007

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Khairul Amri Nasution |
| 2. Nim | : 52153040 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Ujung Padang, 22 September 1996 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 7. Anak Ke | : 6 dari 6 bersaudara |
| 8. Status | : Belum Menikah |
| 9. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 10. Alamat | : Jln. Ujung Padang, Kec. Aek Natas, Kab.
Labuhanbatu Utara |

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. SDN 112303 Ujung Padang | : Tahun 2003 – 2009 |
| 2. MTS AL-Washliyah Adian Torop | : Tahun 2009 – 2012 |
| 3. SMA Negeri 1 Aek Natas | : Tahun 2012 – 2015 |
| 4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | : Tahun 2015 |

III. Riwayat Organisasi

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa UINSU
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Utara
4. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Ujung Padang